



LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 204 TAHUN 2020

TENTANG

TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan penyusunan rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1172);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menunjuk yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini mempunyai tugas, wewenang, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka mendukung Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. melakukan analisis atas Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- c. melakukan rapat dan diskusi terhadap Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. melakukan proses harmonisasi terhadap Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Layanan Bantuan Hukum Di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terhitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berlakunya rancangan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2020.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Oktober 2020
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah

ttd

Roni Dwi Susanto

Tembusan:

Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
 KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH
 NOMOR 204 TAHUN 2020
 TENTANG
 TIM PENYUSUNAN RANCANGAN
 PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA
 PEMERINTAH TENTANG LAYANAN
 BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN
 LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
 BARANG/JASA PEMERINTAH

NAMA TIM PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG LAYANAN BANTUAN HUKUM
 DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
1.	Setya Budi Arijanta NIP. 197012311995031001	Sekretaris Utama	Sekretariat Utama
2.	Suharti NIP. 197306271998032002	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
3.	Fadli Arif NIP. 196707041993031001	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
4.	Sutan Suangkupon Lubis NIP. 196403231992031005	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
5.	Dwi Wahyuni Kartianingsih NIP. 196708061997032001	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional	Direktorat Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
6.	Rinaldi Morintosh NIP.198105092010121001	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat	Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian
7.	Zulhenny NIP. 196803091994022001	Analisis Kebijakan Madya	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
8.	Antonius Lambok Sihombing NIP. 198101142004121001	Analisis Kebijakan Madya	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
9.	Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya NIP. 197706012003121003	Analisis Kebijakan Madya	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
10.	Selamet Budiharto NIP. 196802231989031001	Analisis Kebijakan Madya	Direktorat Advokasi Pemerintah Pusat
11.	Fajar Adi Hemawan NIP. 198008182006041010	Kepala Subdirektorat Dukungan Penegakan Hukum	Direktorat Penanganan Permasalahan
12.	Arif Budiman Anwar NIP. 198106162010121001	Kepala Subdirektorat Penanganan Sengketa Kontrak	Direktorat Penanganan Permasalahan
13.	Octo Army NIP. 19811005 2010121 001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
14.	Ilvia Restu Utami NIP. 198804272012112001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
15.	Thanthawi Jauhari NIP. 198304212010121001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
16.	Rasmita Juliana Sitepu NIP. 19880709 201502 2 001	JF Perancang Peraturan Perundang-undangan	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
17.	Wening Dyah Capriani Hapsari Dewi NIP. 198904282014022001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan
18.	Hilman Fazri NIP. 198903122014021001	Kepala Seksi Monitoring dan Evaluasi Katalog	Direktorat Pengembangan Sistem Katalog
19.	Mira Erviana NIP. 199006222012112001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Penanganan Permasalahan
20.	Febri Kamalisa Rachman NIP. 198402082015022001	Analisis Kebijakan Muda	Direktorat Penanganan Permasalahan
21.	Bretty Rachayu Budiyanthy NIP. 198210252018012001	Analisis Satuan Pengawas Internal	Inspektorat

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja
22.	Ardian Hoppin Sitompul NIP. 19880522 2015021001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
23.	Benny Leopold Dumais NIP. 19890530 2015021001	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
24.	Cecep Hendar Supriadi NIP. 198708312015021001	Analisis Kebijakan Pertama	Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana
25.	Asih Riska Nurmasari NIP.199407252019022005	Calon Perancang Peraturan Perundang-Undangan	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
26.	Cherish Shery Desarya NIP. 198812202019022002	Analisis Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
27.	Mahatmya Widayarsi	Staf Bagian Hukum	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian

Kepala Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah

ttd

Roni Dwi Susanto